

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

KURNIAWAN

07011381924158

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SKRIPSI

Oleh :
KURNIAWAN
07011381924158

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2023

Pembimbing

Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP.199310072019031012

Tanda Tangan



Mengetahui
Ketua Jurusan



Dra. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SKRIPSI

Oleh :
KURNIAWAN
07011381924158

Telah dipertahankan didepan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal, 13 Juni 2023

Pembimbing

1. Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP.199310072019031012



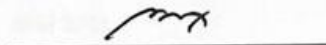
Penguji :

1.Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



2.Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001



Mengetahui,

Dekan Fisip Unsri


Prof.Dr. Alfitri, M.Si
196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik



Dr.M Nur Budiyanto,S.Sos.,MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Apapun Yang Menjadi Takdirmu, Akan Mencari Jalannya Sendiri
Untuk Menemukanmu”**

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi Ini

Saya Persembahkan Kepada :

- **Kedua Orang Tua, Bak dan Umak
Terhebat dan Tercinta**
- **Kakak,Ayuk,Abang dan Adik
Yang Saya Sayangi**
- **Keluarga dan Sahabat-Sahabatku**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurniawan
NIM : 07011381924158
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kabupaten Musi Rawas Utara*" ini adalah benar benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pengangguhan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang di tetapkan kepada saya.

Demikian pernyataan yang dibuat dengan sungguh sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,
Palembang, Juni 2023



Kurniawan
NIM. 07011381924158

ABSTRAK

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Musi Rawas Utara. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Samsat Musi Rawas Utara yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Musi Rawas Utara sudah baik sehingga tiap tahun mengalami peningkatan realisasi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini merekomendasikan Samsat Musi Rawas Utara menambah fasilitas lain untuk menunjang peningkatan pembayaran pajak dan sebaiknya Samsat Musi Rawas Utara melibatkan juga pihak swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pembayaran pajak.

Kata Kunci: Strategi, Penerimaan, Pajak Kendaraan Bermotor

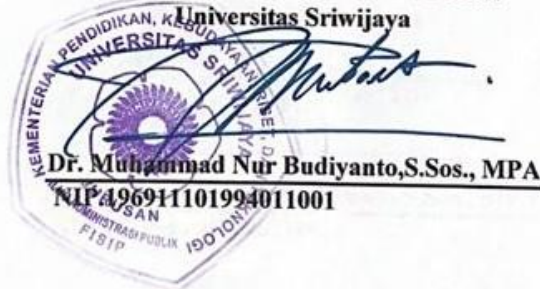
Pembimbing



Anang Dwi Santoso, S.AP.,MPA
NIP. 199310072019031012

Palembang, Juni 2023

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

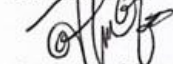
ABSTRACT

ABSTRACT

This study discusses the Strategy for Increasing Motor Vehicle Tax Revenue at the North Musi Rawas Samsat. This is an effort made by the North Musi Rawas Samsat which aims to increase motorized vehicle tax revenue, especially in North Musi Rawas Regency. The purpose of this study was to determine the strategy for increasing motorized vehicle tax revenue at the North Musi Rawas Samsat. This study uses a qualitative method, namely analysis which provides a detailed description based on the results of observations, interviews and documentation. The results showed that the motor vehicle tax revenue strategy at the North Musi Rawas Samsat was good so that every year there was an increase in the realization of motorized vehicle tax revenue. private parties, community organizations, and the motor vehicle community in an effort to increase awareness and compliance with tax payments.

Keywords: Strategy, Revenue, Motor Vehicle Tax

ADVISOR



Anang Dwi Santoso, S.AP.,MPA
NIP. 199310072019031012

Palembang, Mei 2023
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty Social and Political Science
University Of Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat berupa iman dan motivasi, juga kepada kedua orangtua; Bapak Nawawi Umara dan Ibu Rosida , serta saudara kandung saya atas kasih sayang, dukungan, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Musi Rawas Utara*”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan tugas akhir pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam proses pengerjaan usulan proposal penelitian ini, disadari bahwa banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yaitu Bapak Nawawi Umara dan Rosida serta saudara/i saya yang selalu mendoakanku, mendidikku, mendukung moril maupun materil, dan memberiku semangat dalam suka maupun duka serta kasih sayang tak terhingga yang telah mereka berikan kepadaku. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E. selaku rektor Universitas Sriwijaya.
- 2) Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

- 3) Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- 4) Ibu Dr. Lili Erina, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
- 5) Bapak Anang Dwi Santoso, SAP, MPA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangan pikiran, gagasan, ilmu pengetahuan, saran, kritikan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Publik atas ilmu dan wawasan yang diberikan selama ini.
- 7) Admin dan Pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Publik atas kemudahan administrasi selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
- 8) Keluarga besar Administrasi Publik 2019 yang telah berbagi pengalaman, wawasan, dan kebahagiaan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk kritik dan saran membangun yang berkaitan dengan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Palembang, 13 Juni 2023

Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Masalah.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Definisi Konsep.....	36
3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Sumber Data.....	39
3.5 Informan Penelitian	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.8 Sistematika Penulisan	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Profil Instansi	46
4.2 Struktur Organisasi.....	49
4.3 Hasil Penelitian	52
4.4 Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Muratara Tahun 2019- 2022.....	6
Tabel 2. Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Muratara Tahun 2019-2022.....	7
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4. Fokus Penelitian.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 2. <i>Component of Data Analysis : Interactive Model</i>	36
Gambar 3. Struktur Organisasi Samsat Musi Rawas Utara.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mencapai pembangunan yang diproyeksikan, pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan dengan menggunakan asas desentralisasi. Prinsip desentralisasi adalah memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Bab 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 1 angka 5 Ketentuan Umum yaitu, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Seiring dengan adanya otonomi daerah tersebut suatu daerah memiliki kewenangan untuk mengurus pembangunan daerahnya sendiri, oleh sebab itu setiap daerah harus memaksimalkan potensi yang dimiliki agar mampu mendapatkan sumber-sumber penerimaan keuangan yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunannya. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai Pendapatan Daerah yang dihasilkan melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pemisahan Kekayaan Daerah, dan Lainnya. Pendapatan Asli

Daerah yang sah, yang bermaksud memberikan keleluasaan kepada daerah dalam memperoleh dana untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari gagasan desentralisasi (Nadir, 2013).

Pendapatan negara diperoleh dari warganya melalui perpajakan dan dari kekayaan alam negara. Kedua sumber ini merupakan sumber utama penerimaan negara. Pendapatan ini digunakan untuk mendanai kepentingan publik, yang pada akhirnya mencakup kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Akibatnya, jika ada kepentingan umum, pemungutan pajak dapat terjadi, dan pajak dapat digabungkan dengan kepentingan umum (Erly Suandy,2008).

Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang oleh orang atau badan dan diharuskan oleh undang-undang untuk dilakukan tanpa adanya ketidakseimbangan langsung. Mereka digunakan untuk mendanai kebutuhan publik untuk kepentingan penduduk (Mardiasmo, 2011:23).

Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri sehingga mampu melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan daerahnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan tentang sumber pendapatan daerah meliputi, Pajak Daerah , Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya utama yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah peningkatan upaya pemungutan pajak dan perluasan topik dan objek terkait perpajakan. Wajib Pajak diharapkan untuk membayar bagian pajak mereka secara adil sesuai dengan undang-undang dan peraturan lainnya, sebagai bagian dari strategi yang disebut intensifikasi pemungutan pajak, yang bertujuan untuk memaksimalkan pemungutan penerimaan pajak. Sedangkan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pungutan pajak dengan cara memperbanyak jumlah subjek pajak dan memperluas objek pajak dikenal dengan pungutan pajak. penerimaan pajak yang lebih besar, kedua jenis kebijakan tersebut diimplementasikan dan dihubungkan satu sama lain (Badan Analisa Fiskal Departemen keuangan, 2002).

Pajak daerah adalah pungutan wajib kepada orang atau badan usaha yang dikenakan oleh pemerintah daerah tanpa memperhatikan neraca pembayaran secara langsung, yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk mendanai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan (Bambang Prakosa,2005:2).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua

yaitu, pajak provinsi dan pajak kota atau kabupaten. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan, untuk pajak kota atau kabupaten terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Jenis dari Kendaraan Bermotor berupa sedan, jeep, station wagon, bus, truck, sepeda motor, alat-alat berat, dan alat-alat besar.

Sedangkan ekstensifikasi subjek/objek pajak merupakan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah subjek pajak dan memperluas objek pajak. Untuk mendongkrak penerimaan pajak, kedua jenis kebijakan tersebut diimplementasikan dan dihubungkan satu sama lain (Budi, dkk, 2016).

Salah satu pungutan pajak daerah yang berperan penting dalam peningkatan pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

Salah satu pajak daerah tingkat I yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor adalah pajak kendaraan bermotor. Itu dibayar di muka dan dikenakan pajak untuk jangka waktu 12 bulan terus menerus dimulai dengan tanggal pendaftaran (Musnal, 2015). Pajak ini akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga ada keinginan yang sangat kuat dari masyarakat untuk memilikinya (Zulkifli, 2013).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang potensinya sangat besar kedepannya. Hal ini disebabkan karena transportasi menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat saat ini memilih kendaraan pribadi dengan pertimbangan kemudahan dan efisiensi. Pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) didasarkan pada undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang telah diubah dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Badan pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan yang diberi wewenang dalam mengelola pajak kendaraan bermotor (PKB) tingkat daerah dituntut untuk memiliki kemampuan secara profesional dalam mengelola sumber daya keuangan mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan agar dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) berjalan lancar.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dilakukan di kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kabupaten Musi Rawas Utara, secara umum dinilai dari pelaksanaannya telah efektif dan sudah memenuhi setiap standar pelayanan karena pelayanan masyarakat dikelola oleh tiga instansi yang saling bekerja satu sama lain yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah, dan PT. Jasa Raharja (persero).

Ketiga instansi ini bersama-sama dalam kantor SAMSAT memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat wajib pajak tentunya dibutuhkan koordinasi dengan visi dan misi yang sama sehingga di butuhkan suatu strategi yang baik, merupakan suatu gambaran untuk menilai kemampuan instansi dalam menjalankan kegiatan operasinya. Hal ini berguna untuk menghindari ketidakpuasan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang akibatnya terjadi keterlambatan atau tertundanya pembayaran pajak.

Menurut penelitian tentang Retribusi Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat berpengaruh terhadap kekayaan daerah, Untuk menghindari anomali dan kecurangan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pengolahan sumber penerimaan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor secara efektif dan efisien, diperlukan sistem administrasi yang baik. Tabel berikut menampilkan data target dan realisasi, serta data tunggakan, dan data wajib pajak Kendaraan bermotor pada Samsat Musi Rawas Utara tahun 2019-2022.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor UPT Samsat
Muratara Tahun 2019-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	15.486.069.308	16.843.151.700	108,76%
2020	17.213.701.000	19.822.181.100	110,15%
2021	20.417.405.000	23.037.912.150	112,83%
2022	24.597.483.000	26.769.698.850	115,19%

Sumber Data: Kantor UPT Samsat Muratara Tahun 2019-2022

Tabel 2
Data Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Samsat
Muratara Tahun 2019-2022

Tahun	Roda 2	Roda 4
2019	974 Motor	278 Mobil
2020	813 Motor	187 Mobil
2021	609 Motor	115 Mobil
2022	432 Motor	83 Mobil

Sumber Data: Kantor UPT Samsat Muratara Tahun 2019-2022

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah diperlukan suatu strategi yang dapat menunjang tercapainya Tujuan akhir suatu instansi, strategi itu sendiri merupakan suatu cara untuk menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan di yakini dapat memberikan dampak yang positif terhadap instansi, dengan adanya strategi pelayanan yang baik khususnya dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diharapkan dapat diperoleh kemudahan untuk memperoleh kepastian bahwa Tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dengan baik. Jika strategi dalam suatu entitas lemah maka kemungkinan terjadi kesalahan.

Strategi terkait dengan tiga aspek yaitu, Formulasi Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi Strategi (Strategi Menurut Fred R David, 2011). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik mengambil judul penelitian “*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Musi Rawas Utara*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tulis tersebut, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kabupaten Musi Rawas Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis Strategi dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaat pada penelitian ini :

1) Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya terkait manajemen strategi pada organisasi publik.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Samsat Kabupaten Musi Rawas Utara dalam meningkatkan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sangkala. 2012. *Dimensi- Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta : Ombak.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Suandy, Erly.2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2013*. Yogyakarta:Andi.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Nabila, 2018. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017)*.
- Putra, 2018. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar.
- Novrya, Deangella. 2020. *Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru*. Jurnal JOM FISIP Vol. 7.
- Komang, Gusti. Gede, putu. Ketut, I, 2015. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali*. Public Administration Jurnal Vol. 1 (1).

- Masirete, Iswan M. 2013. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso*. Jurnal EKOMEN Vol. 13 No. 2.
- Indah, Dian, Iman Surya & Anwar. 2017. *Strategi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Jailani. 2014. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dispenda Provinsi Riau*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rakatitha ,Putu Nadya Kardevi, Gayatri. 2017. *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 21 No.2
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 *Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*
- Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 *Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang pengertian pajak*
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*